

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PERZINAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN

(Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS)

MONICA MAHARDI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

monicamahardi@gmail.com

ABSTRAK

MONICA MAHARDI (BIII 09258), dengan judul skripsi “**Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Perzinaan Yang dilakukan Oleh Perempuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS)**” di bawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar** sebagai pembimbing I dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh perempuan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana atas tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh perempuan pada perkara putusan Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS.

Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Maros. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara langsung terhadap nara sumber pada instansi tersebut. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum yakni Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP. Hal ini terlihat atas terpenuhinya semua unsur-unsur sesuai dengan pasal yang dikenakan pada terdakwa yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutuskan perkara ini yaitu pada tingkat Pengadilan Negeri Maros menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima bulan dan pada tingkat banding yaitu

Pengadilan Tinggi Makassar menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima bulan namun menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama delapan bulan. Putusan tingkat banding Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS seharusnya majelis hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa hakim harus mempertimbangkan keadaan korban yang mengalami kerugian karena harus bercerai dengan suaminya sehingga kedua anak korban tidak mendapatkan nafkah. Hal ini bukan saja mengenai keadilan tetapi berbicara mengenai contoh kepada masyarakat bahwa setiap tingkah laku atau pun perbuatan seseorang diatur oleh hukum sehingga masyarakat harus mengerti bahwa setiap tindakan mempunyai konsekuensi yang harus diterima.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.¹ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan norma hukum, yang mengikat masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Setiap tindakan warga negara diatur oleh hukum, bahkan hal yang sangat privat atau pribadi sekalipun seperti perkawinan, hukum memegang peran yang cukup besar dalam mengaturnya.

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di atas muka bumi ini dengan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang

¹ C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 346.

diikat dalam sebuah ikatan suci yang dinamakan perkawinan, dan ikatan suci ini dicatatkan dalam sebuah lembaga perkawinan untuk mendapatkan keabsahan dan kekuatan hukum atas perkawinan tersebut. Pengertian perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah

“ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan tidak hanya penyatuan dua pribadi yang berbeda, namun lebih dari itu terkait hubungan kekerabatan kedua belah pihak bahkan juga lingkungan masyarakat sekitarnya. Ikatan dan tujuan perkawinan akan bertahan dan tercapai apabila kedua belah pihak bersama-sama untuk mewujudkannya. Di dalam perjalanan perkawinan tidaklah selalu mulus, ikatan suci dan tujuan perkawinan yang mulia dapat tidak tercapai karena penghianatan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya dengan melakukan perselingkuhan atau perzinaan dengan orang lain atau pihak ketiga. Perzinaan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan.

Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinaan menurut Pasal 284 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) itu diperlukan adanya suatu *vleeslijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.² Sama halnya pada kasus yang dikaji penulis seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 *Burgerlijke Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) berlaku baginya. Pada kasus ini seorang perempuan secara sadar mengetahui bahwa dirinya dan yang turut bersalah sedang terikat dalam

² Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*. Bandung: Sinar Baru. Hlm. 89.

ikatan perkawinan, perbuatan tersebut jelas merupakan tindak pidana dan diancam pidana pada Pasal 284 ayat (1) ke-2b KHUP.

Pengaturan mengenai tindak pidana perzinaan yang diatur dalam KUHP yaitu Pasal 284 yakni Perzinaan merupakan delik aduan absolut atau mutlak yang pelakunya baru akan dijerat hukum apabila ada pengaduan dari suami atau istri dari pelaku.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinaan, hakim harus memutuskan dengan adil tanpa melihat pelakunya perempuan ataupun laki-laki. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu akan memeriksa para pihak maupun alat-alat bukti. Menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perzinaan

1. Kasus Posisi

Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar pukul 22:00 WITA bertempat di dalam rumah terdakwa Yuyun Pramesti di Jl. Foker No. 18 Kompleks Lanud Sultan Hasanuddin, Kab. Maros. Awalnya terdakwa Yuyun Pramesti yang masih berstatus istri dari Junaedi mengirim SMS kepada laki-laki bernama Irawan yang masih berstatus suami dari Sunarti untuk datang ke rumah terdakwa sekitar pukul 19:00 WITA kemudian Irawan meminta izin kepada Sunarti dan mengatakan pergi untuk main play station karena sudah ada SMS teman dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah terdakwa Yuyun, lalu Irawan menyimpan motornya di rumah Natalino Dos Santos tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian Irawan menuju kebelakang rumah

terdakwa karena lampu sementara menyala sehingga Irawan menghubungi terdakwa Yuyun meyuruh untuk mematikan lampu belakang setelah lampu mati maka Irawan masuk dalam rumah lewat pintu dapur dan terdakwa Yuyun Pramesti membuka pintu jendela kamar belakang kemudian Irawan masuk dalam kamar tanpa sepengetahuan dengan Junaedi setelah berada di dalam terdakwa Yuyun memberikan minuman dan Irawan minum, setelah itu Irawan baring di ranjang sambil membuka celana panjang warna hitam abu-abu dan juga terdakwa Yuyun membuka baju lengan panjang kotak-kotak warna hitam, merah, putih, biru, BH warna hitam, celana dalam warna hitam kemudian terdakwa Yuyun memeluk sambil mencium Irawan sehingga terjadi saling berpeluk di atas ranjang dan terdakwa Yuyun menindis Irawan sambil terdakwa Yuyun memasukkan alat kelamin Irawan ke dalam kemaluan terdakwa. Setelah alat kelamin Irawan masuk semua kemudian Irawan digoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali sampai sekitar 10 (sepuluh) menit alat kelamin Irawan mengeluarkan cairan sperma dan ditumpah dalam lubang kemaluan terdakwa Yuyun Pramesti, namun secara tiba-tiba datang suami terdakwa, Junaedi mendobrak pintu belakang dan pintu kamar dengan kedua tangan masuk dan melihat Irawan melompat lari lewat jendela kamar belakang hanya memakai celana dalam pendek warna abu-abu dan baju kaos oblong warna hitam dikejar oleh Junaedi sambil berteriak maling-maling sedangkan terdakwa Yuyun sendiri membawa lari anaknya yang masih di dalam kamar sembunyi setelah suaminya Junaedi mengejar Irawan, kemudian terdakwa Yuyun membawa pergi anaknya itu.

Setelah Irawan tertangkap oleh Junaedi kemudian Junaedi memegang kerah baju Irawan dan juga sudah banyak warga masyarakat datang begitu juga petugas POM AU sudah datang menangkap Irawan

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dari dakwaan penuntut umum terhadap kasus tersebut yang di bacakan di hadapan persidangan majelis hakim Pengadilan Negeri Maros, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yuyun Pramesti, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar jam 22:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di dalam rumah terdakwa Yuyun Pramesti di Jl. Foker No. 18 Kompleks Lanud Sultan Hasanuddin, Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya. Seorang perempuan hanya satu orang laki sebagaimana suaminya, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara:

Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar jam 21:30 WITA di dalam kamar rumah terdakwa perempuan Yuyun Pramesti di Jl. Foker No. 18 Komp. TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin, Kab. Maros saksi lelaki Irawan sedang berada di rumahnya dan sekitar jam 19:00 WITA tiba-tiba menerima SMS dari terdakwa Yuyun Pramesti yang mengatakan kepada lelaki Irawan (terdakwa di Pengadilan Militer Makassar) menjawab mengatakan iya, lalu lelaki Irawan meminta izin kepada istrinya saksi perempuan Sunarti, Irawan mengatakan saya pergi untuk main play station karena sudah ada SMS teman (terdakwa Yuyun) dan pada waktu saksi lelaki Irawan pergi naik sepeda motor menuju ke rumah terdakwa Perempuan Yuyun, saksi lelaki Irawan menyimpan motornya di rumah Natalino Dos Santos tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian saksi lelaki Irawan menuju kebelakang rumah terdakwa, karena lampu sementara menyala sehingga saksi lelaki Irawan menghubungi terdakwa Yuyun meyuruh mematikan lampu belakang setelah lampu mati maka saksi lelaki Irawan masuk dalam rumah lewat pintu dapur dan terdakwa Yuyun Pramesti membuka pintu jendela kamar belakang kemudian saksi lelaki Irawan masuk dalam kamar tanpa sepengetahuan dengan saksi Junaedi (suami terdakwa) setelah berada di dalam terdakwa perempuan Yuyun memberikan minuman fanta dan lelaki Irawan minum, setelah itu saksi lelaki Irawan baring di ranjang sambil membuka celana panjang warna hitam abu-abu dan juga terdakwa perempuan Yuyun membuka baju lengan panjang kotak-kotak warna hitam, merah, putih, biru, BH warna hitam, celana dalam warna hitam kemudian terdakwa perempuan Yuyun memeluk sambil mencium lelaki Irawan sehingga terjadi saling berpeluk di atas ranjang dan terdakwa Yuyun menindis lelaki Irawan sambil terdakwa Yuyun memasukkan alat kelamin lelaki Irawan ke dalam kemaluan terdakwa. Setelah alat kelamin saksi lelaki Irawan masuk semua dan alat kelamin lelaki Irawan digoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali sampai sekitar 10 (sepuluh) menit alat kelamin saksi

mengeluarka cairan sperma dan ditumpah dalam lubang kemaluan terdakwa Yuyun Pramesti, namun secara tiba-tiba datang suami terdakwa, lelaki Junaedi mendobrak pintu belakang dan pintu kamar dengan kedua tangan masuk dan melihat lelaki Irawan melompat lari lewat jendela kamar belakang hanya memakai celana dalam pendek warna abu-abu dan baju kaos oblong warna hitam dikejar oleh saksi Junaedi sambil berteriak maling-maling sedangkan terdakwa perempuan Yuyun sendiri membawa lari anaknya yang masih di dalam kamar sembunyi setelah suaminya Junaedi mengejar Irawan, kemudian terdakwa Yuyun membawa pergi anaknya itu.

Bahwa pada waktu Junaedi saksi Irawan 300 meter jaraknya antara lelaki Junaedi dengan lelaki Irawan yang dikejar berhenti sehingga lelaki Irawan dapat tertangkap oleh Junaedi dan Irawan membentak Junaedi, mengatakan apa kamu, dan mengaku mengatakan saya baru satu kali ini, kemudian lelaki Junaedi memegang kerah baju lelaki Irawan dan juga sudah banyak warga masyarakat datang dan juga petugas POM AU sudah datang menangkap lelaki Irawan dan saksi lelaki Junaedi kembali ke rumahnya mencari istri terdakwa Yuyun Pramesti tetapi tidak ada di rumahnya dan sudah melarikan diri, pada saat itulah saksi lelaki Junaedi ada dalam pikirannya bahwa pasti telah terjadi perzinahan lelaki Irawan dengan istrinya Yuyun Pramesti, sehingga lelaki Junaedi shock dan pingsan besok harinya baru bangun dan sadarkan diri di RS AU.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa perempuan Yuyun tersebut, maka saksi lelaki Junaedi mengalami kerugian sehingga telah menceraikan istrinya sesuai putusan Pengadilan Agama Maros tanggal 3 Oktober 2011 dan saksi korban perempuan Sunarti telah mengalami kerugian karena suaminya adalah teman selingkuhan terdakwa perempuan Yuyun Pramesti dan suaminya lelaki Irawan telah diputus perkaranya di Pengadilan Militer Makassar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sehingga saksi korban Sunarti tidak dapat lagi gaji untuk menghidupi dirinya serta 2 orang anaknya yang masih kecil.

Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yuyun Pramesti terbukti bersalah melakukan tindak pidana "seorang perempuan telah kawin yang turut serta

melakukan perbuatan zina, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuyun Pramesti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam, putih, biru;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar seprey warna pink putih ungu.
 - Dikembalikan kepada terdakwa Yuyun.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
 - 1(satu) lembar celana panjang warna hitam.
 - Dikembalikan kepada Irawan.
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah yang telah dilegalisir PA. Maros an. Junaedi dan Yuyun Pramesti No.887/2/III/1999:
 - Tetap dalam berkas perkara.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros dalam perkara ini pada tingkat pengadilan negeri Maros adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Yuyun Pramesti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam, merah, putih, biru;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar seprey warna pink putih ungu.

Dikembalikan kepada terdakwa Yuyun Pramesti Binti Mukidjo;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Irawan;

- 1 (satu) lembar foto copy ktipan akta nikah yang telah dilegalisir PA. Maros an. Junaedi dan Yuyun Pramesti No. 887/2/III/1999:

Tetap dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Adapun yang menjadi amar putusan nomor: 87/PID/2012/PT.MKS dalam perkara ini pada tingkat Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 15 Februari 2012 Nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima bulan
4. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama delapan bulan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros untuk selebihnya
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedankan tingkat banding sebesar Rp. 2.000.

5. Analisis Penulis

Berdasarkan putusan perkara Nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros menyatakan bahwa terdakwa Yuyun Pramesti terbukti bersalah melakukan tindak pidana perzinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP sesuai yang didakwakan penuntut umum adalah:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur yang telah menikah (bersuami/beristri)
3. Turut berbuat zina;
4. Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seseorang bernama Yuyun Pramesti selaku terdakwa yang ada dalam surat dakwaan sehingga tidaklah terjadi kesalahan terhadap yang diduga melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan terlihat terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah yang telah dilegalisir Pengadilan Agama Maros an. Junaedi dan Yuyun Pramesti No. 887/2/III/1999 tetap dalam berkas perkara. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa pada saat kejadian, terdakwa telah terikat tali perkawinan yang sah dengan saksi Junaedi. Bahwa dengan demikian unsur yang telah menikah (bersuami/beristri) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana hasil pemeriksaan persidangan terbukti pada waktu dan tempat kejadian saksi Irawan telah mendatangi rumah terdakwa ketika suaminya sedang tugas jaga dan memasuki rumah terdakwa dan melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin terdakwa hingga mengeluarkan air mani. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, telah terbukti pula bahwa saksi Irawan telah terikat tali perkawinan yang sah dengan saksi Sunarti, sebagai lelaki yang berbuat zina dan terdakwa sebagai orang yang bersama-sama melakukannya harus dipandang turut melakukan

perbuatan. Bahwa dengan demikian unsur turut berbuat zina telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berlakunya pasal 27 BW dalam unsur ini adalah menyangkut asas monogami/monoandri sehingga setiap golongan yang menganut asas tersebut haruslah dinyatakan bahwa pasal 27 BW berlaku baginya (vide SEMA No. 8 tahun 1980). Bahwa terdakwa sebagai golongan muslim sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka asas tersebut juga berlaku baginya. Bahwa dengan demikian unsur padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penerapan hukum terhadap tindak pidana zina dalam putusan Nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Penulis sependapat bahwa penerapan ketentuan pidana materil oleh Jaksa Penuntut umum sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang mana berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan saksi serta pengakuan dari terdakwa, telah terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perzinaan dan unsur-unsurnya pun telah mencocoki rumusan delik sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP dalam dakwaan tunggal yang merumuskan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.”

B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Perzinaan yang Dilakukan Oleh Perempuan

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.

Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tinggi Makassar Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tertanggal 20 Desember 2011 NO.REG. PERKARA: PDM- 210/MRS/EP.1/12/2011 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yuyun Pramesti, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar jam 22:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di dalam rumah terdakwa Yuyun Pramesti di Jl. Foker No. 18 Kompleks Lanud Sultan Hasanuddin, Kab. Maros atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya. Seorang perempuan hanya satu orang laki sebagaimana suaminya, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar jam 21:30 WITA di dalam kamar rumah terdakwa perempuan Yuyun Pramesti di Jl. Foker No. 18 Komp. TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin, Kab. Maros saksi lelaki Irawan sedang berada di rumahnya dan sekitar jam 19:00 WITA tiba-tiba menerima SMS dari terdakwa Yuyun Pramesti yang mengatakan kepada lelaki Irawan (terdakwa di Pengadilan Militer Makassar) menjawab mengatakan iya, lalu lelaki Irawan meminta izin kepada istrinya saksi perempuan Sunarti, Irawan mengatakan saya pergi untuk main play station karena sudah ada SMS teman (terdakwa Yuyun) dan pada waktu saksi lelaki Irawan pergi naik sepeda motor menuju ke rumah terdakwa Perempuan Yuyun, saksi lelaki Irawan menyimpan motornya di rumah Natalino Dos Santos tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian saksi lelaki Irawan menuju kebelakang rumah terdakwa, karena lampu sementara menyala sehingga saksi lelaki Irawan menghubungi terdakwa Yuyun meyuruh mematikan lampu belakang setelah lampu mati maka saksi lelaki Irawan masuk dalam rumah lewat pintu dapur dan terdakwa Yuyun Pramesti membuka pintu jendela kamar belakang kemudian saksi lelaki Irawan masuk dalam kamar tanpa sepengetahuan dengan saksi Junaedi (suami terdakwa) setelah berada di dalam terdakwa perempuan Yuyun memberikan minuman fanta dan lelaki Irawan minum, setelah itu saksi lelaki Irawan baring di ranjang sambil membuka celana panjang warna hitam abu-abu dan juga terdakwa perempuan Yuyun membuka baju lengan panjang kotak-kotak warna hitam, merah, putih, biru, BH warna hitam, celana dalam warna hitam kemudian terdakwa perempuan Yuyun memeluk sambil mencium lelaki Irawan sehingga terjadi saling berpeluk di atas ranjang dan terdakwa Yuyun menindis lelaki Irawan sambil terdakwa Yuyun memasukkan alat kelamin lelaki Irawan ke dalam kemaluan terdakwa. Setelah alat kelamin saksi lelaki Irawan masuk semua dan alat kelamin lelaki Irawan digoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali sampai sekitar 10 (sepuluh) menit alat kelamin saksi mengeluarkan cairan sperma dan ditumpah dalam lubang kemaluan terdakwa Yuyun Pramesti, namun secara tiba-tiba datang suami terdakwa, lelaki Junaedi mendobrak pintu belakang dan pintu kamar dengan kedua tangan masuk dan melihat lelaki Irawan melompat lari lewat jendela kamar belakang hanya memakai celana dalam pendek warna abu-abu dan baju

kaos oblong warna hitam dikejar oleh saksi Junaedi sambil berteriak maling-maling sedangkan terdakwa perempuan Yuyun sendiri membawa lari anaknya yang masih di dalam kamar sembunyi setelah suaminya Junaedi mengejar Irawan, kemudian terdakwa Yuyun membawa pergi anaknya itu.

Bahwa pada waktu Junaedi saksi Irawan 300 meter jaraknya antara lelaki Junaedi dengan lelaki Irawan yang dikejar berhenti sehingga lelaki Irawan dapat tertangkap oleh Junaedi dan Irawan membentak Junaedi, mengatakan apa kamu, dan mengaku mengatakan saya baru satu kali ini, kemudian lelaki Junaedi memegang kerah baju lelaki Irawan dan juga sudah banyak warga masyarakat datang dan juga petugas POM AU sudah datang menangkap lelaki Irawan dan saksi lelaki Junaedi kembali ke rumahnya mencari istri terdakwa Yuyun Pramesti tetapi tidak ada di rumahnya dan sudah melarikan diri, pada saat itulah saksi lelaki Junaedi ada dalam pikirannya bahwa pasti telah terjadi perzinahan lelaki Irawan dengan istrinya Yuyun Pramesti, sehingga lelaki Junaedi shock dan pingsan besok harinya baru bangun dan sadarkan diri di RS AU.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa perempuan Yuyun tersebut, maka saksi lelaki Junaedi mengalami kerugian sehingga telah menceraikan istrinya sesuai putusan Pengadilan Agama Maros tanggal 3 Oktober 2011 dan saksi korban perempuan Sunarti telah mengalami kerugian karena suaminya adalah teman selingkuhan terdakwa perempuan Yuyun Pramesti dan suaminya lelaki Irawan telah diputus perkaranya di Pengadilan Militer Makassar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sehingga saksi korban Sunarti tidak dapat lagi gaji untuk menghidupi dirinya serta 2 orang anaknya yang masih kecil.

Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 26 Januari 2011 Nomor: REG.PERK: PDM-210/Mrs/Ep.2/12/2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusannya tanggal 15 Februari 2012 Nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros.

Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang dibuat oleh Marwati, S.H Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Maros, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2012, Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 15 Februari 2012 Nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros, permintaan banding tersebut telah

diberitahukan kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 21 Februari 2012, oleh Sangkala, S.H jurusita Pengadilan Negeri Maros.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan tingkat banding, penasihat hukum terdakwa mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 27 Februari 2012, penyerahan memori banding telah diberitahukan kepada jaksa penuntut umum oleh Marwati, S.H. panitera muda pidana Pengadilan Negeri Maros.

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 2 Maret 2012, penyerahan kontra memori banding telah diberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa oleh Sangkala, S.H. jurusita Pengadilan Negeri Maros.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 Februari 2012 oleh Drs. Junaedi, S.H. panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Maros.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menuntut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan dalam putusan pengadilan negeri maros tanggal 15 Februari 2012 Nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa dan kontra memori banding dari jaksa penuntut umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal tanggal 15 Februari 2012 Nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros, serta memori banding dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam

memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Pengadilan tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa sekarang ini sedang memelihara dan mengasuh anak kecil, sehingga diperlukan waktu banyak untuk merawat dan mengasuh anak.
- Kesalahan terdakwa telah dimaafkan oleh mantan suaminya
- Terdakwa telah menerima saksi moral dan sosial yaitu telah diceraikan oleh suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 15 Februari 2012 Nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkian.

Saksi-saksi

1. Junaedi (saksi disumpah)
2. Ahmad (saksi disumpah)
3. Yudi (saksi disumpah)
4. Irwan (saksi disumpah)
5. Sunarti (saksi disumpah)

Keterangan Terdakwa

Bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah mantan istri saksi Junaedi;
- Bahwa terdakwa bercerai dengan saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pada tanggal 17 Mei tahun 2011, di Jl. Foker No. 18 Kompleks Lanud Sultan Hasanuddin Maros;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, saksi datang ke rumah terdakwa lalu masuk ke kamar terdakwa dan melakukan hubungan badan dengan terdakwa;

- Bahwa pada saat itu suami terdakwa sedang tugas jaga di Pos Lanud Hasanuddin;
- Bahwa saksi tidak merasakan nikmat dan tidak mengeluarkan air mani;
- Bahwa saksi Junaedi kemudian datang mendobrak pintu sehingga saksi Irawan meloncat lewat jendela untuk melarikan diri.

Barang Bukti

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam, merah, putih, biru;
2. 1(satu) lembar BH warna hitam;
3. 1(satu) lembar celana dalam warna hitam;
4. 1 (satu) lembar spreng warna pink putih ungu;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
6. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
7. 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam.

Alat Bukti Surat

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah yang telah dilegalisir Pengadilan Agama Maros an. Junaedi dan Yuyun Pramesti No. 887/2/III/1999.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat, barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa antara satu dengan yang lainnya adalah saling berkaitan, maka fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dan saksi Junaedi masih terikat tali perkawinan yang sah
- Bahwa pada saat kejadian saksi Irawan dan saksi Sunarti juga terikat tali perkawinan yang sah
- Bahwa kejadian pada tanggal 17 Mei tahun 2011, di Jl. Foker No. 18 Kompleks Lanud Sultan Hasanuddin Maros
- Bahwa sebelum kejadian, saksi Irawan di SMS oleh terdakwa agar datang ke rumahnya karena suami terdakwa mendapat tugas jaga pada malam harinya
- Bahwa saksi irawan kemudian datang ke rumah terdakwa dan masuk melalui pintu belakang
- Bahwa saksi Irawan lalu masuk ke kamar terdakwa dan melakukan hubungan badan dengan cara penis terdakwa di masukkan ke dalam vagina terdakwa
- Bahwa saksi Irawan merasakan nikmat dan mengeluarkan air mani
- Bahwa saksi Junaedi kemudian datang mendobrak pintu sehingga saksi meloncat lewat jendela untuk melarikan diri
- Bahwa saksi Irawan kemudian ditangkap dan diserahkan kepada petugas POM

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi telah diadili di DILMIL Makassar dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dipecat dari dinas militer

2. Analisis Penulis

Penulis berpendapat bahwa selain berpedoman pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 9 KUHP dimana wewenang hakim di pengadilan yaitu, mengadili yang merupakan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Selain itu majelis hakim juga berdasar pada apa yang menjadi dakwaan penuntut umum, sesuai dengan fungsi dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, selain itu hakim juga lebih cenderung memperhatikan kondisi korban yang mendapat kerugian.

Dalam hal ini ada aspek yuridis dan non yuridis yang dapat menjadi dasar pemidanaan. Majelis hakim dapat melihat aspek yuridis seperti kesesuaian perbuatan terdakwa dengan pasal yang didakwakan, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan. Selain itu tanggapan terhadap pledoi terdakwa juga merupakan aspek yuridis yang mana pada kasus ini telah menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya mempersoalkan bahwa perdamaian antara korban dan terdakwa tidak dapat dipandang sebagai penarikan delik aduan karena tidak dilakukan secara resmi dan tidak pula dilakukan sebelum pemeriksaan dimulai sesuai pada Pasal 284 ayat (4) KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

“Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai”

Dalam pledoi terdakwa juga mengatakan perkara tidak dapat dilanjutkan karena korban belum bercerai dengan suaminya, analisis yuridisnya yaitu keberlakuan Pasal 27 BW pada Pasal 284 ayat (2) KUHP harus dikembalikan kepada pengertian awalnya tanpa perluasan makna

yaitu hanya berlaku bagi mereka yang merupakan golongan non muslim. Pledoi terdakwa menyebutkan bahwa perkara *ne bis in idem* yang diajukan terdakwa tidaklah berdasar karena pelaku yang diajukan berbeda sementara salah satu syarat *ne bis in idem* yaitu waktu, tempat, pelaku dan peristiwa harus sama.

Aspek yuridis selanjutnya mengenai dasar peringanan dan pemberatan pidana, dalam kasus ini hal-hal yang memberatkan terdakwa sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak psikologis yang buruk terutama bagi anak-anaknya, mantan suami terdakwa dan saksi Sunarti beserta anak-anaknya

Hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan masih butuh kasih sayang seorang ibu
- Terdakwa bersikap sopan dan mempermudah jalannya persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal
- Terdakwa telah saling bermaafan dengan korban

Aspek non yuridis yang dapat menjadi dasar memidanaan yakni seperti perencanaan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, dalam dakwaan penuntut umum telah dijelaskan awal terjadinya tindak pidana ini dimulai dari sikap korban yang mengirim SMS kepada saksi Irawan agar datang ke rumahnya karena suaminya Junaedi sedang tidak di rumah.

Aspek non yuridis selanjutnya yakni riwayat hidup dan kehidupan sosial ekonomi terdakwa. Dapat dilihat bahwa terdakwa merupakan istri dari seorang TNI AU begitupun saksi Irawan merupakan seorang TNI AU, dapat menjadi perbandingan apakah faktor ekonomi dapat menjadi penyebab atas tindak pidana ini. Selanjutnya dapat dilihat pengaruh sanksi yang diberikan terhadap masa depan terdakwa, saksi tersebut

selain memberikan efek jera terhadap terdakwa tetapi juga lebih bersifat pembinaan sehingga terdakwa dapat menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum pidana. Selanjutnya akibat yang ditimbulkan terhadap korban, dalam kasus ini korban Sunarti mengalami kerugian karena tidak dapat menafkahi dirinya beserta anak-anaknya karena saksi Irawan dipidana selama tujuh bulan dan dipecat dari dinas militer. Selanjutnya saling bermaafannya korban dan terdakwa, hal ini bukan menjadi hapusnya pidana melainkan dapat menjadi faktor yang meringankan terdakwa. Selanjutnya aspek non yuridis yang dapat menjadi dasar pembedaan yakni pandangan masyarakat terhadap tindak pidana ini. Norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan pedoman hidup yang dijalani masyarakat tersebut terlebih lagi hukum adat tidak dapat dipisahkan dalam suatu masyarakat sehingga hal-hal yang menjadi benar dan salah perlulah diperhatikan karena seseorang hidup dan berinteraksi dengan masyarakat tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Nur Kholis (wawancara tanggal 10 Januari 2013) yaitu salah satu anggota majelis hakim yang memutus perkara nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros mengatakan bahwa dalam memutus suatu perkara hakim dalam mengambil keputusan di persidangan ada tiga hal yang harus menjadi acuan yaitu:

- Asas kepastian
- Asas keadilan
- Asas manfaat

Selain itu ada hal yang harus dipertimbangkan yakni:

- Mempertimbangkan legal justice
- Mempertimbangkan sosial justice
- Mempertimbangkan moral justice

Dalam kasus ini terjadi penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya dalam hal ini ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebabnya, menurut Nur Kholis yang dapat menjadi faktor tersebut adalah

- Faktor ekonomi
- Faktor kedekatan seorang perempuan dengan laki-laki
- Faktor moral

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara putusan Nomor:227/Pid.B/2011/PN.Maros, penulis sependapat dengan hal tersebut karena dalam memutus perkara majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, seperti tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Tetapi dalam putusan tingkat banding Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS penulis tidak sependapat dengan putusan hakim tersebut yang mana pidana penjara yang diberikan terdakwa yaitu pidana penjara lima bulan tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama delapan bulan. Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa hakim harus mempertimbangkan keadaan korban yang mengalami kerugian karena harus bercerai dengan suaminya sehingga kedua anak korban tidak mendapatkan nafkah. Hal ini bukan saja mengenai keadilan tetapi berbicara mengenai contoh kepada masyarakat bahwa setiap tingkah laku atau pun perbuatan seseorang diatur oleh hukum sehingga masyarakat harus mengerti bahwa setiap tindakan mempunyai konsekuensi yang harus diterima.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Yuyun Pramesti telah sesuai dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum yakni Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP. Hal ini terlihat atas terpenuhinya semua unsur-unsur sesuai dengan pasal yang dikenakan pada terdakwa yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhi oleh Majelis Hakim.
2. Dalam memutus perkara majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutus perkara ini yaitu pada tingkat Pengadilan Negeri Maros menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima bulan dan pada tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Makassar menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima bulan namun menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa

percobaan selama delapan bulan. Putusan tingkat banding Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS penulis tidak sependapat dengan putusan hakim tersebut, majelis hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa hakim harus mempertimbangkan keadaan korban yang mengalami kerugian karena harus bercerai dengan suaminya sehingga kedua anak korban tidak mendapatkan nafkah. Hal ini bukan saja mengenai keadilan tetapi berbicara mengenai contoh kepada masyarakat bahwa setiap tingkah laku atau pun perbuatan seseorang diatur oleh hukum sehingga masyarakat harus mengerti bahwa setiap tindakan mempunyai konsekuensi yang harus diterima.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- A. Fuad Usfa. 2006. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Amir Ilyas, dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- C.S.T. Kansil dan Christine. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Ilhami Bisri. 2011. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Laden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*. Bandung: Sinar Baru.

Liliana Tedjosaputro. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Jakarta: Aneka ilmu.

M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.

Muchsin. 2005. *Ikhtisar Hukum Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Penerbit Iblam.

Neng Djubaedah. 2010. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

INTERNET

Puteri Hikmawati. Perluasan Pelaku Perzinaan Dalam Revisi KUHP. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/adminjurnal13108127.pdf>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2012.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2012.

